

Beberapa masukan Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO

Memperhatikan perkembangan terakhir terkait rancangan peraturan presiden tentang sistem sertifikasi ISPO, maka kami yang tergabung dalam Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO memberikan pandangan dan masukan sebagai berikut:

- ✓ Proses penguatan Sistem Sertifikasi ISPO pada awalnya diharapkan mampu mendorong tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dan mampu meningkatkan daya saing sektor kelapa sawit. Dialog yang cukup terbuka antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2016. Sejumlah konsultasi publik di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua pun telah diselenggarakan pada bulan Mei hingga Agustus 2017 dan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk rancangan Perpres serta prinsip dan kriteria standard sistem sertifikasi ISPO.
- ✓ Akan tetapi, terjadi pengabaian terhadap hasil proses konsultasi multipihak yang berlangsung sejak Juni 2016 hingga September 2017 dan isi draft rancangan Perpres tentang Sistem Sertifikasi ISPO yang disusun pada bulan Januari 2018 malah berpotensi menjadi langkah mundur yang makin melemahkan ISPO.
- ✓ Draft rancangan Perpres yang disusun melalui pertemuan terbatas sejak akhir 2017 tersebut seolah mengabaikan hasil dan masukan dari konsultasi publik regional. Beberapa poin penting masukan masyarakat dari hasil Konsultasi Publik terhadap rancangan Perpres ISPO telah dikeluarkan, seperti prinsip ketelusuran dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak dirujuknya prinsip HAM yang fundamental dalam sistem sertifikasi ISPO jelas merupakan langkah mundur. Terlebih karena pelanggaran HAM dalam konflik antara masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit cukup besar di Indonesia,
- ✓ Draft rancangan ini juga menghilangkan pengaturan mengenai pemantauan independen terhadap sistem sertifikasi ISPO. Posisi dan peran pemantau independen juga direduksi menjadi bagian dari komite sertifikasi, yang secara substansial mengurangi makna independensi dari pemantau. Ini jelas akan melemahkan kredibilitas sistem itu sendiri. Selain itu, draft rancangan Perpres ini juga tidak mengatur mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan, yang merupakan salah satu indikator akuntabilitas sistem.
- ✓ Digabungkannya prinsip 'perlindungan hutan alam/primer dan gambut' dengan 'manajemen lingkungan' menjadi 'pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati' tanpa merujuk kembali pada pentingnya prinsip 'perlindungan' merupakan salah satu contoh isi rancangan yang melemahkan ISPO. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah dalam upaya perlindungan hutan dan gambut yang tersisa dan memperbaiki daya saing industri sawit Indonesia.
- ✓ Kami mengusulkan agar proses penguatan ISPO kembali menggunakan draft Perpres ISPO yang dibahas hingga bulan September 2017. Kami melihat versi tersebut telah mengadopsi beberapa rekomendasi untuk rancangan Perpres serta prinsip dan kriteria ISPO yang dihasilkan dari proses konsultasi publik di region Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
- ✓ Kami mengusulkan agar Pemerintah menyelenggarakan Konsultasi Publik di tingkat nasional, agar Draft Perpres ISPO hasil konsultasi public regional juga mendapat masukan dari para pihak di tingkat nasional.

- ✓ Kami kelompok masyarakat sipil menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan proses yang tidak transparan dan partisipatif dalam pembahasan rancangan Perpres sistem sertifikasi ISPO yang telah mengakibatkan berbagai perubahan signifikan pada batang tubuh Perpres di luar proses yang telah disepakati. Apabila tidak ada perbaikan dalam proses dan substansi draft rancangan sampai dengan disahkannya Perpres ini, menurut kami proses ini telah gagal mencapai tujuan utama penguatan ISPO untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat daya saing sektor kelapa sawit Indonesia.

= = =

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) – LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) - Forest Watch Indonesia (FWI) - Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) - Kaoem Telapak - Yayasan Sumberdaya Dunia Indonesia - Greenpeace Indonesia - Yayasan Madani Berkelanjutan - Institute for Ecosoc Rights - GAIA - Tropical Forest Foundation (TFF) -Padi Indonesia, Kalimantan Timur - Jasoil, Papua Barat - Uno Itam, Aceh - Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi - Evergreen, Sulawesi Tengah - Yayasan Pusaka - Sayogyo Institute – Indonesia Center for Environmental Law – Kemitraan - GeRak Aceh - Stabil Kalimantan Timur - PPLH Mangkubumi - JAPESDA Gorontalo - GRID Kalimantan Barat – LPMA Borneo, Kalimantan Selatan - Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), Aceh - Jikalahari, Riau – KomnasDes, Sulawesi Tenggara – HAKI, Sumatera Selatan – LinkAR, Kalimantan Barat – TERAS, Sulawesi Tenggara – POKKER SHK, Kalimantan Tengah – Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Lampung – ROA, Sulawesi Tengah – Jurnal Celebes, Sulawesi Selatan – Yayasan Mitra Insani (YMI), Riau – HAKA, Aceh – Perkumpulan Bin Madag Hom Teluk Bintuni, Papua Barat – Wallacea, Sulawesi Selatan – Yayasan Intsia Papua, Papua – PHPKP, Papua Barat – LBH Papua, Papua.